

BAB 1

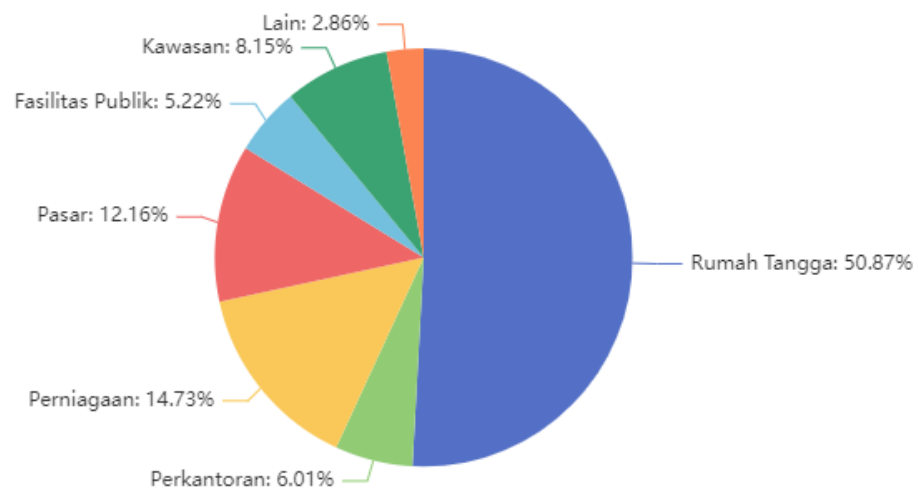
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan di berbagai negara sangat beragam, mulai dari permasalahan di bidang ekonomi, sosial, budaya maupun lingkungan. Permasalahan di bidang lingkungan hidup yang berkaitan dengan kehidupan tidak akan lepas dari permasalahan sampah. Sampah merupakan istilah yang menggambarkan sesuatu yang sudah tidak lagi digunakan, tidak diminati dan harus dibuang, dimana sampah yang dihasilkan berasal dari kegiatan manusia (Azwar dalam Hardiyanti, 2020). Sampah menjadi permasalahan global yang sampai saat ini masih belum bisa teratasi dengan cepat dan tepat.

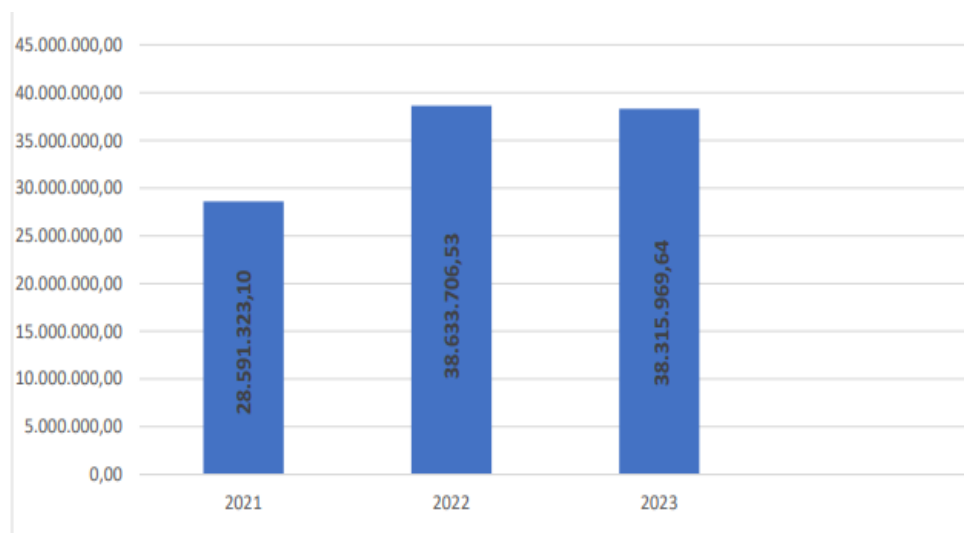
Permasalahan sampah masuk dalam salah satu tujuan dari SDGs (*Sustainable Development Goals*) atau tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs merupakan sebuah komitmen yang dilakukan secara global maupun nasional berupaya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara menyeluruh. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah menetapkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan global yang dihadapi dalam kehidupan. Permasalahan sampah lebih masuk dalam tujuan SDGs ke-12 yaitu Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (Zuhriyah, 2023). Tujuan pada poin ini lebih menekankan kepada tanggung jawab dalam pola konsumsi dan produksi karena semakin tinggi tingkat konsumsi akan menghasilkan sampah yang lebih banyak.

Sampah menjadi sebuah persoalan yang terjadi di berbagai negara baik itu negara maju maupun berkembang. Indonesia menjadi salah satu negara yang menghadapi permasalahan sampah. Indonesia telah meraih posisi kelima sebagai negara yang menghasilkan sampah terbanyak di dunia di tahun 2020 setelah negara Tiongkok, Amerika Serikat, India dan Brazil (Katadata.com). Tingginya sampah yang dihasilkan negara Indonesia berkaitan dengan posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Indonesia di tahun 2020 berada pada urutan keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia (Katadata.com). Sampah yang dihasilkan Indonesia berasal dari berbagai sumber. Sumber sampah merupakan awal mula dari munculnya berbagai jenis sampah yang berasal dari aktivitas manusia maupun proses alam yang dapat menghasilkan sampah



Gambar 1. 1 Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah Tahun 2023
Sumber : SIPSN, 2023

Sumber sampah yang disajikan dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan bahwa sampah di Indonesia berasal dari sampah rumah tangga, perkantoran, perniagaan, pasar, fasilitas publik, kawasan dan lain-lain. Pada tahun 2023 sampah yang berasal dari rumah tangga mencapai persentase 50,87%, sampah perkantoran 6,01%, sampah perniagaan 14,73%, sampah pasar 12,16%, sampah fasilitas publik 5,22%, sampah kawasan 8,15% dan sampah lainnya 2,86%. Sampah rumah tangga menjadi sumber sampah yang paling tinggi diantara sumber sampah lainnya sehingga timbulan sampah yang ada di Indonesia dominan berasal dari sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga merujuk kepada sampah yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam rumah tangga terkecuali tinja dan sampah spesifik. Timbulan sampah di Indonesia dapat disajikan secara nasional, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.



Gambar 1. 2 Timbulan Sampah Secara Nasional Tahun 2021-2023

Sumber : SIPSN (2023), Telah diolah kembali

Timbulan sampah di Indonesia secara nasional pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 38.633.706.53 ton/tahun dari tahun sebelumnya yang berjumlah 28.591.323.10 ton/tahun di tahun 2021. Sedangkan, timbulan sampah di Indonesia secara nasional tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi 38.315.969.64 ton/tahun. Timbulan sampah di Indonesia dilihat dari tahun 2021 hingga 2023 bergerak secara dinamis setiap tahunnya. Timbulan sampah yang tidak diimbangi dengan adanya pengelolaan sampah yang baik dapat menimbulkan sebuah permasalahan dibidang kesehatan maupun lingkungan (Tarigan, 2024).

Pengelolaan sampah telah diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang dijelaskan dalam UU No 18 Tahun 2008 yaitu pengelolaan sampah terdiri atas pengurangan dan penanganan sampah. Tujuan dari pengelolaan sampah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkualitas, kesehatan dari masyarakat yang semakin membaik dan mengubah sampah menjadi sumber daya yang lebih bermanfaat. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki tugas untuk menjamin pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik dan mengedepankan wawasan lingkungan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari undang-undang tentang pengelolaan sampah.

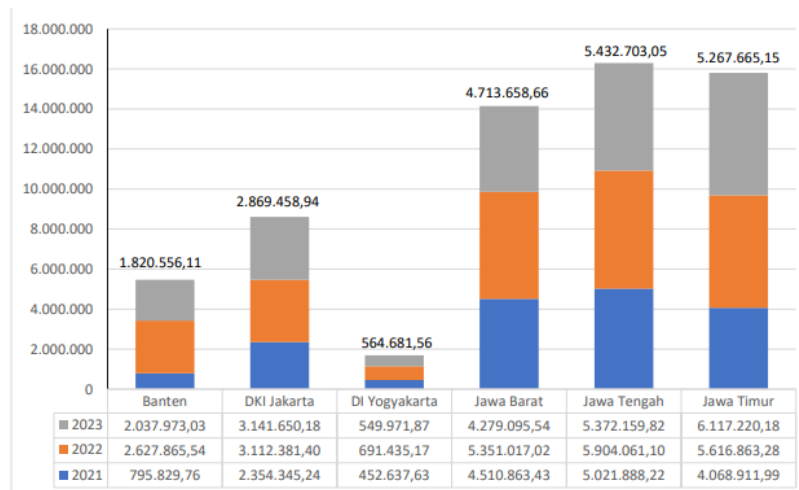
Tabel 1. 1 Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2023

No	Keterangan	Jumlah (Ton/Tahun)
1	Timbulan Sampah	38.315.969.64
2	Pengurangan Sampah	5.226.550.25
3	Penanganan Sampah	18.401.524.14
4	Sampah Terkelola	23.628.074.39
5	Sampah Tidak Terkelola	14.687.895.25

Sumber : SIPSN, 2023

Hasil capaian kinerja pengelolaan sampah tahun 2023 menunjukkan bahwa pengurangan sampah di tahun 2023 sebanyak 5.226.550.25 ton/tahun yang dipresentasikan mencapai 13,64% dan penanganan sampah mencapai 18.401.524.14 ton/tahun atau dipresentasikan menjadi 48.03%. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan pemerintah memiliki target dalam pengurangan sampah mencapai 30% dan penanganan sampah mencapai 70% dari total timbulan sampah pada tahun 2025 sehingga memerlukan komitmen tinggi dari pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah agar mencapai target yang telah ditentukan.

Selain timbulan sampah yang disajikan secara nasional, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menyajikan data mengenai timbulan sampah pada tingkat provinsi. Indonesia memiliki jumlah provinsi sebanyak 38 provinsi, dimana provinsi dengan timbulan sampah yang tinggi banyak berada di Pulau Jawa. Provinsi yang berada di pulau Jawa meliputi Banten, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Sebagian besar provinsi di Pulau Jawa memiliki timbulan sampah yang tinggi secara terus menerus.



**Gambar 1. 3 Rata-Rata Timbulan Sampah
di Pulau Jawa Tahun 2021-2023**

Sumber : SIPSN(2023),Telah diolah kembali

Rata-rata timbulan sampah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2023 sebesar 5.432.703.05 ton. Rata-rata timbulan sampah di Provinsi Jawa Timur sebanyak 5.267.665.15 ton. Rata-rata timbulan sampah di Provinsi Jawa Barat mencapai 4.713.658.66 ton. Hal ini menunjukkan Provinsi Jawa Tengah menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan rata-rata timbulan sampah yang paling tinggi diantara provinsi lainnya sehingga daerah-daerah di Provinsi Jawa Tengah baik itu kabupaten maupun kota masih memiliki permasalahan terkait dengan sampah.

**Tabel 1. 2 Timbulan Sampah Tingkat Kabupaten/Kota
di Jawa Tengah Tahun 2023**

No	Kabupaten	Timbulan Sampah Harian (ton)	Timbulan Sampah Tahunan (ton)
1	Kab. Cilacap	954.54	348,406.57
2	Kab. Banyumas	541.80	197,758.42
3	Kab. Kebumen	483.19	176,363.85

4	Kab. Purworejo	321.73	117,432.91
5	Kab. Wonosobo	363.87	132,810.94
6	Kab. Magelang	662.38	241,767.97
7	Kab. Boyolali	296.91	108,373.66
8	Kab. Klaten	649.45	237,050.70
9	Kab. Sukoharjo	364.70	133,114.77
10	Kab. Wonogiri	350.68	127,999.02
11	Kab. Sragen	595.35	217,301.22
12	Kab. Grobogan	863.15	315,050.32
13	Kab. Blora	387.49	141,433.02
14	Kab. Rembang	254.16	92,770.06
15	Kab. Pati	687.93	251,092.63
16	Kab. Kudus	435.78	159,061.34
17	Kab. Jepara	423.48	154,571.51
18	Kab. Demak	733.93	267,884.52
19	Kab. Semarang	533.16	194,601.94
20	Kab. Temanggung	403.72	147,357.80
21	Kab. Kendal	421.36	153,796.40
22	Kab. Pekalongan	394.58	144,022.43
23	Kab. Tegal	604.09	220,493.69
24	Kab. Brebes	1,005.31	366,937.60
25	Kota Magelang	80.55	29,400.33
26	Kota Surakarta	419.11	152,974.67
27	Kota Salatiga	116.43	42,496.23
28	Kota Semarang	1,182.29	431,534.65
29	Kota Tegal	187.13	68,300.63

Sumber : SIPSN, 2023

Pada tingkat kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, Kota Semarang menempati posisi pertama sebagai kota dengan jumlah timbulan sampah harian mencapai 1,182.29 ton dan jumlah timbulan sampah tahunan mencapai 431,534.65 ton. Kabupaten yang berada di posisi kedua dengan timbulan sampah harian sebesar 1,005.31 ton dan timbulan sampah tahunan sebesar 366,937.60 ton terletak di Kabupaten Brebes. Sementara pada posisi ketiga jumlah timbulan sampah

dalam sehari mencapai 954.54 ton dan sampah dalam kurun waktu tahunan mencapai 348,406.57 ton berada di Kabupaten Cilacap.

Kota Semarang merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Kota Semarang memiliki banyak tempat industri, perusahaan, instansi pemerintahan, tempat pendidikan ternama sehingga banyak penduduk yang berasal dari desa pindah ke Kota Semarang. Penduduk yang melakukan perpindahan dari desa ke kota mengakibatkan jumlah penduduk di perkotaan terus bertambah. Jumlah penduduk yang semakin meningkat akan memberikan suatu perubahan dalam pola konsumsi dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan timbulan sampah (Hadamuan, 2022).

Tabel 1. 3 Timbulan sampah di Kota Semarang Tahun 2021-2023

No	Tahun	Timbulan sampah per hari (Ton)	Timbulan sampah per tahun (Ton)
1	2021	1.180.14	430.749.75
2	2022	1.181.06	431.085.22
3	2023	1.182.29	431.534.65

Sumber : Satu Data Kota Semarang, 2023

Timbulan sampah di Kota Semarang selama tiga tahun terakhir dari tahun 2021 hingga 2023 terus mengalami peningkatan. Timbulan sampah di Kota Semarang secara berturut-turut dari tahun 2021-2023 yaitu 1.180.14 ton, 1.181.06 ton, 1.182.29 ton dalam sehari. Timbulan sampah yang semakin meningkat dapat membatasi ruang dan mengganggu kegiatan masyarakat sehingga menurunkan kualitas hidupnya (Saputro.dkk dalam Ardiyansyah, 2024). Timbulan sampah di Kota Semarang harus dikelola

secara tepat dengan berpedoman kepada kebijakan tentang pengelolaan sampah yang berlaku di Kota Semarang.

Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan suatu kebijakan yang membahas mengenai pengelolaan sampah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang No 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini memiliki tujuan untuk menciptakan pengelolaan sampah secara optimal dan mengutamakan wawasan lingkungan di Kota Semarang (Alridho,2024) Pengelolaan sampah di Kota Semarang harus dilakukan mulai dari hulu hingga hilir atau sumber sampah hingga pemrosesan akhir supaya permasalahan sampah dapat teratasi dengan baik.

Pengelolaan sampah yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah merupakan suatu kegiatan untuk membatasi timbulan sampah, melakukan kegiatan daur ulang dan memanfaatkan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah merupakan rangkaian kegiatan mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang dijabarkan dalam pasal 17 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan pasal 17 meliputi pemeliharaan TPS, TPST dan TPA beserta pengembangannya sesuai

dengan kebutuhan; Penyediaan sarana dan melakukan pengangkutan sampah dari TPS, TPST ke TPA; Penyediaan sarana dan melakukan pengolahan sampah di TPS, TPST dan TPA; Penyediaan sarana pemilahan sampah di TPS, TPST dan TPA.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana dari Pemerintah Daerah yang bergerak pada bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang membantu pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi masalah sampah yang selama ini terjadi di Kota Semarang. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam melaksanakan pengelolaan sampah tidak lepas dari kewajiban yang tercantum dalam kebijakan pengelolaan sampah yang berlaku di Kota Semarang. Namun, pada kenyataannya kendala saat menjalankan kewajiban dalam pengelolaan sampah masih ditemukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Tabel 1. 4 Jumlah TPS di Kota Semarang Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS)
1	2021	255
2	2022	255
3	2023	232

Sumber : Satu Data Kota Semarang, 2023

Jumlah tempat penampungan sementara (TPS) yang ada di Kota Semarang dari tahun 2021 hingga 2022 berjumlah 255 TPS, tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 232 TPS sehingga jumlah TPS menjadi berkurang sebanyak 23 TPS. Berkurangnya jumlah TPS di Kota Semarang mengakibatkan kemampuan dalam menampung sampah yang

dihasilkan Kota Semarang menjadi terbatas. Jumlah TPS yang tersedia di Kota Semarang akan lebih cepat penuh untuk menampung sampah dibandingkan dengan sebelum mengalami penurunan jumlah TPS karena sampah yang dihasilkan dari Kota Semarang setiap tahun terus bertambah.

Berkurangnya jumlah TPS dapat menimbulkan adanya TPS ilegal (Saraswati.et al, 2023). TPS ilegal terbentuk dari adanya timbulan sampah yang keberadaanya diluar dari TPS yang telah difasilitasi oleh pemerintah. Keberadaan TPS ilegal sangat mengganggu kenyamanan karena lingkungan sekitar menjadi kumuh. TPS ilegal di Kota Semarang seringkali berada pada tepi jalan, tepi sungai maupun lahan kosong yang dapat dijadikan tempat untuk menampung sampah. TPS ilegal timbul dari keterbatasan jumlah TPS yang tersedia di Kota Semarang dalam menampung sampah yang dihasilkan Kota Semarang.



Gambar 1. 4 Kondisi TPS di Kota Semarang

Sumber : Tribun Jateng, 2023

TPS yang berada di Kota Semarang belum memiliki sarana pemilahan sampah yang memadai. Sarana yang tersedia pada TPS hanya berupa kontainer sampah yang digunakan untuk menampung sampah yang dihasilkan Kota Semarang. Dengan adanya kontainer sampah mengakibatkan sampah yang masuk ke TPS tidak bisa dipisahkan berdasarkan jenis-jenisnya. Sampah yang dikumpulkan pada TPS dalam kondisi tercampur dalam satu wadah atau kontainer sampah hingga diangkut menuju TPA Jatibarang.

Pengelolaan sampah secara kumpul-angkut-buang sudah tidak tepat digunakan karena saat ini sampah dapat dipandang menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bernilai ekonomis (Seruyaningtyas,2017). Namun, tidak semua TPS yang berada di Kota Semarang mampu menerapkan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*). Kota Semarang hanya memiliki 7 TPS3R yang tersebar di Pedurungan Lor, Pedalangan, Muktiharjo, Mangkang Timur, Polaman, Sambiroto dan Sampangan (Pemerintah Kota Semarang, 2023). Sampah lebih banyak masuk ke TPS yang tidak menerapkan 3R sehingga kurang membantu mengurangi volume sampah yang akan diangkut ke TPA Jatibarang.

Selain TPS3R, Kota Semarang juga memiliki TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) untuk membantu mengelola sampah supaya sampah yang akan diangkut ke TPA Jatibarang menjadi lebih berkurang dari sebelumnya. Namun, Kota Semarang hanya memiliki TPST yang tersebar pada 6 titik diantaranya yaitu Gemah, BSB, Mijen, Pool Timur,

UNNES, UNDIP (Pemerintah Kota Semarang, 2023). Padahal pengelolaan sampah yang dilakukan di TPST dapat menghasilkan residu, dimana sampah yang sudah tidak bisa diolah dalam TPST baru diangkut ke TPA Jatibarang supaya dapat menghemat daya tampung dari TPA Jatibarang.

Tabel 1. 5 Presentase Volume Sampah Terangkut dari TPS ke TPA

Keterangan	Tahun		
	2021	2022	2023
Presentase Volume Sampah Terangkut dari TPS ke TPA	90%	90,5%	91%

Sumber : Satu Data Kota Semarang, 2023

Volume sampah yang terangkut dari TPS yang ada di Kota Semarang menuju ke TPA Jatibarang pada tahun 2023 mencapai presentase sebesar 91%. Presentase tersebut menunjukkan bahwa sampah dari TPS yang ada di Kota Semarang tidak diangkut secara keseluruhan ke TPA Jatibarang. Sisa volume sampah yang tidak terangkut ke TPA Jatibarang dapat menimbulkan sebuah permasalahan yang dirasakan masyarakat seperti bau yang tidak sedap, lingkungan yang menjadi kumuh, kerusakan lingkungan dan lain sebagainya (Daeni dan Rizki).

Sampah dari seluruh TPS, TPS3R maupun TPST yang berada di Kota Semarang akan berakhir pada TPA Jatibarang. TPA Jatibarang merupakan satu-satunya tempat pemrosesan akhir yang terletak di Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Daya tampung dari TPA Jatibarang mampu menampung sampah sebanyak 900 ton dalam sehari. Namun, sampah yang dihasilkan Kota Semarang

melebihi dari daya tampung TPA Jatibarang itu sendiri. Timbulan sampah di Kota Semarang mampu mencapai 1.182.29 ton dalam sehari sehingga TPA Jatibarang mengalami *overload* atau kelebihan muatan. TPA Jatibarang mengalami keterbatasan karena luas lahan dari TPA Jatibarang hanya seluas 46 hektar. Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Semarang memiliki wacana akan memperluas lahan TPA Jatibarang supaya dapat menambah daya tampung sampah, tetapi hingga tahun 2023 TPA Jatibarang tidak mengalami perluasan lahan (Tirto.id).

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang sangat diperlukan karena kebijakan mengenai pengelolaan sampah sudah ditetapkan sejak lama, tetapi permasalahan sampah sampai saat ini masih terus terjadi di Kota Semarang. Peneliti ingin mengetahui sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah dalam mengatasi permasalahan sampah yang selama ini terjadi di Kota Semarang. Hal ini memunculkan pertanyaan penelitian mengapa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang belum maksimal?. Dengan demikian, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Jumlah TPS di Kota Semarang mengalami penurunan

Jumlah TPS di Kota Semarang tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 232 TPS. Hal ini mengakibatkan

TPS yang ada di Kota Semarang akan lebih cepat penuh dan menimbulkan terjadinya TPS ilegal.

2. Penyediaan sarana pemilahan sampah yang kurang memadai

TPS di Kota Semarang menggunakan kontainer sampah untuk menampung sampah sehingga berbagai jenis sampah masih tercampur saat terkumpul pada TPS hingga diangkut ke TPA Jatibarang.

3. Kurang mengoptimalkan prinsip 3R dalam pengelolaan sampah

Sampah di Kota Semarang lebih banyak dikelola pada TPS yang tidak menerapkan 3R karena Kota Semarang hanya memiliki 7 TPS3R dan 6 TPST sehingga kurang membantu mengurangi volume sampah yang dikirimkan ke TPA Jatibarang.

4. Volume sampah terangkut dari TPS ke TPA tidak maksimal

Pada tahun 2023 volume sampah yang terangkut dari TPS yang ada di Kota Semarang ke TPA Jatibarang sebesar 91% sehingga sampah yang berada di TPS tidak diangkut secara keseluruhan ke TPA Jatibarang. Hal ini menimbulkan bau yang tidak sedap, lingkungan kumuh, kerusakan lingkungan dan lain sebagainya.

5. Keterbatasan daya tampung TPA Jatibarang

TPA Jatibarang memiliki kemampuan menampung sampah sebanyak 900 ton dalam sehari, sedangkan sampah yang dihasilkan Kota Semarang mencapai 1.182.29 ton dalam sehari sehingga dapat mengakibatkan terjadinya *overload* di TPA Jatibarang.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang ditinjau dari kriteria evaluasi kebijakan menurut William N Dunn?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang ditinjau dari kriteria evaluasi kebijakan menurut William N Dunn.
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Administrasi Publik yang lebih mengarah kepada kebijakan publik tepatnya kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan di Kota Semarang. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan penelitian selanjutnya yang menggunakan teori evaluasi kebijakan untuk mengetahui kebijakan tersebut berhasil atau gagal dalam mencapai tujuan.

1.5.2 Kegunaan Praktis

A. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan banyak pengetahuan dan wawasan mengenai kebijakan yang fokus kepada pengelolaan sampah dan menambah pengalaman baru dalam mencari informasi maupun data untuk mencari kebenaran dalam penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan.

B. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan informasi yang dapat menyadarkan masyarakat untuk berkontribusi dalam mengelola sampah dengan cara yang tepat.

C. Bagi Pemerintah

Penelitian ini memberikan koreksi yang dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan bagi pemerintah dalam menangani persoalan mengenai sampah dan memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan referensi kepada pemerintah terkait dalam pengelolaan sampah.

D. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat menambah laporan penelitian dalam perpustakaan yang dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa mengenai evaluasi kebijakan pengelolaan sampah.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sumber rujukan yang digunakan dalam menyusun penelitian. Penelitian terdahulu berguna untuk menghindari adanya kesamaan atau plagiasi dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti. Penelitian terdahulu dapat memperkuat dan memperdalam suatu kajian dalam penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti. Peneliti mengambil beberapa referensi dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah diantaranya sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan Arif pada tahun 2023 mengambil judul tentang evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan masih belum merata di semua wilayah karena hanya empat kecamatan yang mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan pada kecamatan-kecamatan lain yang tidak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah. Keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah suatu kebijakan mengenai pengelolaan sampah yang diterapkan di suatu daerah

seharusnya berlaku untuk semua kecamatan yang berada di daerah tersebut. Penulis perlu mengkaji lebih mendalam untuk menjamin pelayanan pengelolaan sampah dapat dirasakan semua wilayah. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan terlihat pada teori yang digunakan yaitu evaluasi kebijakan menurut William Dunn yang memuat enam kriteria yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu penelitian terdahulu tidak membahas faktor pendorong maupun penghambat evaluasi kebijakan pengelolaan sampah, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berusaha mencari tahu faktor-faktor yang menjadi pendorong maupun penghambat evaluasi kebijakan pengelolaan sampah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mamahit, Najoan dan Monintja pada tahun 2021 dengan judul evaluasi kebijakan pengelolaan persampahan di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut pendapat dari William Dunn yang fokus kepada empat kriteria yaitu efektivitas, kecukupan, responsivitas dan ketepatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Manado masih belum maksimal karena kondisi armada pengangkutan sampah dapat dikatakan kurang baik, banyak

masyarakat yang membuang sampah diluar waktu yang telah ditentukan yaitu pukul 06.00 hingga 18.00 dan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah kondisi dari armada yang mengalami kerusakan mempengaruhi kemampuan dalam proses pengangkutan sampah yang dilakukan pada setiap TPS. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilaksanakan penulis yaitu meneliti dari sudut pandang pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang diperkuat dengan sudut pandang dari masyarakat. Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu penelitian terdahulu tidak menggunakan kriteria efisiensi dan pemerataan, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Hardiyanti, Purnaweni dan Sundarso pada tahun 2020 yang mengangkat judul evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Kalikondang Kabupaten Demak. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah masih belum berjalan dengan maksimal dikarenakan pengelolaan sampah masih menggunakan *open dumping*, sarana maupun prasarana yang mendukung pengelolaan sampah masih terbatas, pengangkutan sampah yang berjalan tidak

sesuai dengan jadwal, penggunaan biaya hanya dialokasikan untuk membeli BBM truk pengangkut dan membeli tanah untuk menimbun sampah serta tanggapan yang diberikan DLH Kabupaten Demak dalam menanggapi keluhan dari masyarakat tidak menyelesaikan permasalahan. Keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pengelolaan sampah membutuhkan anggaran untuk mencapai keberhasilan suatu tujuan sehingga sumber anggaran dan distribusinya harus dilakukan secara tepat dan merata supaya pengelolaan sampah dapat berjalan dengan maksimal. Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama sama menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William Dunn. Perbedaan dari keduanya terletak pada tempat penelitian, dimana penelitian terdahulu dilaksanakan pada TPA Kalikondang sedangkan penelitian yang penulis laksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Lukman bersama dengan rekan-rekan peneliti pada tahun 2022 yang berjudul evaluasi konteks kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut pendapat dari William Dunn. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Efektivitas dalam pengangkutan sampah masih belum tepat waktu,

keberadaaan sampah yang masih berserakan, dan meningkatnya tempat pembuangan sampah secara ilegal. 2) Kecukupan dalam tempat untuk membuang sampah mengalami penurunan dari segi jumlahnya. 3) Responsivitas dari penyedia maupun penerima layanan masih rendah karena menormalisasikan pembuangan sampah secara sembarangan. 4) Ketetapan pada suatu tujuan dalam kebijakan pengelolaan sampah dapat memberikan manfaat. Penelitian terdahulu memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni tindakan yang dilakukan pemerintah selaku penyedia layanan dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan sampah. Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama sama membahas evaluasi suatu kebijakan mengenai pengelolaan sampah. Perbedaan yang mencolok diantara keduanya terlihat pada rumusan masalahnya, dimana penelitian terdahulu tidak menganalisis faktor pendorong maupun penghambat kebijakan pengelolaan sampah.

Kelima penelitian yang dilaksanakan Janatun bersama rekan-rekan penelitiannya di tahun 2024 yang mengambil judul terkait dengan evaluasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung. Penelitian ini memakai metode penelitian deskriptif kualitatif. Teori evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William Dunn. Hasil penelitiannya mengemukakan regulasi

mengenai pengelolaan sampah di Kota Bandung belum diterapkan dengan tegas sehingga masih banyak masyarakat yang kurang menaati regulasi yang telah ditetapkan. Selain itu, penyediaan kapasitas tempat penampungan sementara dikatakan belum mencukupi kebutuhan untuk menampung sampah. Hal ini dapat mengganggu kenyamanan bagi masyarakat sekitar. Keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah kapasitas tempat penampungan sementara yang dibutuhkan setiap wilayah berbeda-beda karena jumlah timbulan sampah yang dihasilkan juga berbeda sehingga perlu adanya penyesuaian dan pertimbangan dalam penyediaan kapasitas TPS. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis laksanakan yaitu kesamaan dalam jumlah TPS yang terbatas sehingga kapasitas yang tersedia untuk menampung sampah belum mencukupi. Perbedaan dari kedua penelitian ini dapat dilihat dari tempat penelitiannya, dimana penelitian terdahulu berada di Kota Bandung sedangkan penelitian yang penuliis laksanakan berada di Kota Semarang.

Keenam penelitian yang dilakukan oleh Samsu, Zuada dan Rendy pada tahun 2020 yang berjudul *evaluation of waste management policy in Palu City*. Metode yang dipergunakan di dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut Wiliam Dunn. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa kriteria

efektivitas, efisiensi dan kecukupan masih menemukan permasalahan dalam pengelolaan sampah karena masyarakat masih memiliki kesadaran yang rendah untuk menjaga lingkungan, mengelola sampah dan mematuhi jam operasional saat membuang sampah. Keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pengelolaan sampah tidak bisa dilakukan oleh pihak pemerintah saja, melainkan perlu peran serta dari masyarakat itu sendiri sebagai pihak yang menghasilkan sampah. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilaksanakan penulis berada pada fokus penelitian yang membahas mengenai evaluasi suatu kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah. Perbedaan diantara kedua penelitian tersebut yaitu penelitian terdahulu lebih melihat kepada posisi masyarakat dalam mengelola sampah, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai keterkaitan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sampah.

Ketujuh penelitian yang dilakukan oleh Tarigan bersama dengan rekan-rekannya di tahun 2024 dengan judul yang diangkat yaitu evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Bandar Khalipah. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan menjelaskan tentang Desa Bandar Khalipah yang sampai saat ini belum memiliki tempat pembuangan akhir sehingga banyak masyarakat yang melakukan pembakaran maupun penguburan

sampah. Sampah yang tidak terkelola dengan benar dapat memicu terjadinya suatu bencana yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Namun, banyak masyarakat yang acuh tak acuh terhadap pengelolaan sampah yang disebabkan perbedaan latarbelakang dari masing-masing individu yang membedakan sudut pandang dalam pengelolaan sampah. Keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah yang tergolong rendah mengakibatkan adanya ketidakpedulian atas tindakan yang mereka dilakukan. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis sama sama mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah. Namun, perbedaan diantara kedua penelitian ini dapat dilihat dari kondisi Desa Bandar Khalipah yang tidak memiliki lahan TPA sehingga sampah Desa Bandar Khalipah berakhir ditimbun dalam tanah, sedangkan Kota Semarang memiliki lahan TPA sebesar 46 hektar sehingga berakhir pada tahap pemrosesan akhir.

Kedelapan penelitian yang dilakukan oleh Hedomuan dan Tuti pada tahun 2022 yang mengambil judul tentang evaluasi kebijakan terhadap pengelolaan sampah kawasan dan timbulan di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian membahas tentang pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah masih menemukan suatu kendala dalam pengelolaan sampah karena sumber daya

manusia yang menjalankan kebijakan dan sarana prasarana yang mendukung keberjalanan suatu kebijakan masih tergolong kurang memadai. Keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sumber daya manusia yang memadai dengan fasilitas yang mendukung dalam pengelolaan sampah dapat membantu mencapai tujuan yang diharapkan. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama sama mengevaluasi suatu kebijakan tentang pengelolaan sampah. Perbedaan yang terlihat diantara kedua penelitian tersebut yaitu penelitian terdahulu fokus kepada tahapan pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pemusnahan, pola inividu langsung dan tidak langsung. Sedangkan penelitian ini lebih menilai suatu kebijakan menggunakan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

Kesembilan penelitian yang dilaksanakan oleh Ardiansyah bersama dengan rekan-rekannya pada tahun 2024 yang mengangkat judul tentang evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada dinas kebersihan pertamanan dan pemakaman di Kota Bima. Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan membahas tentang pengelolaan sampah yang dilakukan mulai dari hulu hingga hilir belum maksimal karena kegiatan daur ulang maupun pemanfaatan sampah belum terlaksana dengan baik. Selain

itu pada pemrosesan akhir sampah masih perlu ditingkatkan dengan penerapan teknologi yang ramah lingkungan supaya dampak negatif yang ditimbulkan dapat berkurang. Keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pengelolaan sampah tidak akan mencapai tujuan apabila hanya fokus pada hilir saja. Perlu adanya kerjasama dari hulu supaya pengelolaan sampah dapat berjalan dengan maksimal. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni mengevaluasi kebijakan tentang pengelolaan sampah. Perbedaan yang terlihat diantara keduanya yaitu penelitian terdahulu tidak membahas mengenai faktor-faktor pendukung maupun penghambat evaluasi kebijakan pengelolaan sampah, sedangkan penelitian ini menggali faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat evaluasi kebijakan pengelolaan sampah.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan pada tahun 2023 oleh Shakil, Azhar dan Othman yang berjudul *Solid Waste Management in Malaysia : an overview*. Hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa Malaysia menghasilkan sampah padat mencapai 38 ribu ton setiap hari pada tahun 2020 sehingga pemerintah Malaysia mengencakan kampanye kegiatan daur ulang sampah supaya dapat memanfaatkan sampah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, membantu menurunkan biaya pengangkutan sampah dan memperpanjang usia tempat pemrosesan akhir. Namun, dalam

pelaksanaanya masih memiliki beberapa kendala dalam penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah dan kurangnya pendidikan mengenai pengelolaan sampah. Keterkaitan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah kegiatan daur ulang sampah termasuk dalam prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), dimana prinsip tersebut sangat membantu mengurangi jumlah sampah yang dikirimkan ke tempat pemrosesan akhir. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah tempat pengelolaan sampah menjadi tempat yang tepat untuk melaksanakan kegiatan daur ulang sampah. Perbedaan diantara keduanya yaitu penelitian terdahulu hanya fokus kepada kegiatan daur ulang sampah saja, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih kompleks dalam menilai kebijakan pengelolaan sampah.

Kesebelas, penelitian yang dilakukan tahun 2023 oleh Cunha yang membawakan judul terkait dengan evaluation of municipal solid waste management in the states of Amazonas. Hasil dari penelitiannya yaitu kota-kota kecil yang berada di Amazon masih belum melaksanakan pengelolaan sampah secara tepat karena kurangnya persiapan dari para pengelola kota dalam mengelola sampah sehingga masih ditemukan sampah-sampah yang berserakan pada trotoar maupun ditepi sungai. Keterkaitan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah persiapan secara matang dari pemerintah mulai dari tingkat

pusat sampai tingkat kabupaten/kota sangat diperlukan supaya pengelolaan sampah dapat berjalan secara maksimal. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah melakukan evaluasi mengenai pengelolaan sampah. Perbedaannya yang dapat terlihat diantara keduanya yaitu penelitian terdahulu dilaksanakan di negara bagian Amazon, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berada di Indonesia khususnya Kota Semarang.

Keduabelas, penelitian yang dilakukan oleh Karenhapukh bersama teman-teman penelitiannya yang mengangkat judul *Effectiveness of Waste Management in the United States of Amerika*. Hasil dari penelitiannya membahas tentang Amerika Serikat memiliki badan pusat yang mengurus masalah sampah padat yang bernama *Environmental Protection Agency (EPA)*, dimana EPA memiliki target dalam kegiatan daur ulang sampah dapat mengalami peningkatan dari 5% menjadi 7% karena daur ulang sampah sangat efektif untuk mengurangi jumlah sampah. Keterkaitan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah kegiatan mengubah sampah menjadi barang yang bernilai tinggi sangat memberikan banyak manfaat bagi kehidupan maupun lingkungan. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah kesamaan cara yang digunakan dalam pengelolaan sampah, salah satunya dengan

melakukan daur ulang sampah. Perbedaan yang terlihat diantara keduanya yaitu penelitian terdahulu membahas efektivitas pengelolaan sampah di Amerika Serikat, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang.

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi publik menurut Dimock, Dimock & Fox dalam (Keban, 2019:6) merupakan suatu proses menghasilkan barang dan jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Administrasi publik dapat dikatakan sebagai kegiatan yang dapat menciptakan sebuah produk maupun pelayanan supaya kebutuhan dari masyarakat dapat terpenuhi.

Chandler dan Plano dalam (Keban, 2019:3) memaparkan bahwa administrasi publik merupakan kegiatan memproses sumber daya supaya dapat dilakukan formulasi, implementasi, dan pengelolaan suatu keputusan di dalam kebijakan publik. Administrasi publik lebih menekankan kepada penggunaan sumber daya yang dimiliki untuk merencanakan, menjalankan dan mengambil keputusan dalam kebijakan publik.

Administrasi publik yang didefinisikan Pasalong dalam (Widanti, 2022:24) yaitu suatu kerja sama yang dilaksanakan oleh lembaga dalam menjalankan suatu tugas pemerintahan supaya dapat melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan publik dengan

efisien serta efektif. Administrasi Publik lebih mengarah kepada upaya yang dilakukan beberapa lembaga yang bersatu dalam rangka menjalankan sebuah tugas di dalam pemerintahan agar kebutuhan publik dapat terpenuhi.

Ibrahim dalam (Widanti, 2022:24) mendeskripsikan administrasi publik yaitu kegiatan menyelenggarakan pemerintah dengan menerapkan manajemen (merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan) melalui mekanisme kerja dan dorongan dari sumber daya manusia. Ibrahim lebih mengartikan administrasi publik sebagai sebuah aktivitas manajemen yang diterapkan dalam suatu organisasi pemerintah yang mendapatkan dukungan dari SDM dalam pelaksanaannya.

Dwight Waldo dalam (Nugraha. et al, 2022) mendefinisikan administrasi publik yaitu suatu kegiatan manajemen dalam sebuah organisasi yang memanfaatkan manusia dan peralatan demi mencapai tujuan yang diinginkan. Pada pengertian tersebut menekankan pemanfaatan SDM maupun alat-alat yang dimiliki organisasi dalam melakukan manajemen.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dijelaskan oleh beberapa ahli terkait dengan administrasi publik, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang manajemen publik maupun kebijakan

publik dalam sebuah organisasi. Manajemen berguna untuk mengatur sebuah pelayanan yang diberikan kepada publik, sementara kebijakan berguna untuk memberikan aturan kepada publik supaya ditaati.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma menurut Robert T. Golembiewski dalam (Keban,2019:41) yaitu standar disiplin ilmu yang fokus membahas tentang metode yang digunakan dalam penyelesaian suatu masalah dan lokus yang membahas tentang tempat untuk melaksanakan metode tersebut. Nicholas Henry dalam (Keban,2019:41) mengemukakan lima paradigma administrasi publik meliputi:

- a. Paradigma 1 : Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926).

Paradigma pertama terkenal dengan tokoh Frank J. Goodnow dan Leonardo D. White. Goodnow memiliki tulisan dengan judul “*Politics and Administration*” yang menceritakan politik memiliki fokus pada kebijakan dan administrasi memusatkan pada implementasi dari suatu kebijakan. Paradigma ini melihat administrasi memiliki nilai yang bebas yang diberikan arahan untuk mencapai efisiensi maupun ekonomi. Namun, pada paradigma ke satu hanya menekankan tempat saja yakni *government*

bureaucracy, sedangkan metode yang digunakan tidak dijelaskan.

b. Paradigma 2: Prinsip Administrasi (1927-1937)

Paradigma kedua dipelopori oleh Willoughby, Gullick & Urwick, Fayol dan Taylor. Beberapa tokoh tersebut memperkenalkan metode administrasi publik meliputi perencanaan, organisasi, manajemen, pengarah, pengoordinasian, pengorganisasian, dan pelaporan (POSDCORB). Namun, paradigma kedua tidak menggambarkan tempat dengan jelas karena prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dimanapun.

c. Paradigma 3 : Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Pada paradigma ketiga menemukan pertentangan dalam pemisahan antara politik dengan administrasi. Dalam buku karya Morstein Marx "*Element of Public Administration*" menegaskan bahwa John Gaus memberikan penekanan mengenai politik tidak dapat dipisahkan dari administrasi. Paradigma ini muncul sebagai ilmu politik karena memiliki tempat pada birokrasi pemerintah, sedangkan metodenya menjadi lemah karena prinsip administrasi telah kabur.

d. Paradigma 4 : Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Paradigma keempat memiliki metode dengan menerapkan perilaku dalam menjalankan organisasi, menganalisis manajemen dan menggunakan teknologi terbaru. Metode yang digunakan dapat diterapkan pada organisasi publik maupun privat sehingga tempat yang tepat untuk paradigma ini memiliki ketidakjelasan.

e. Paradigma 5 : Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-sekarang)

Paradigma kelima memiliki tempat dan metode yang jelas. Paradigma ini memiliki tempat pada persoalan publik dan kepentingan publik, sedangkan metode yang digunakan lebih kepada teori-teori seperti manajemen, organisasi dan kebijakan publik.

f. Paradigma 6 : Governance (1990-sekarang)

Paradigma governance menjadi paradigma yang paling akhir. Dalam paradigma ini mengutamakan kerjasama yang baik dalam melakukan pemerataan antara tiga pihak yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.

Berdasarkan paradigma administrasi publik yang sudah dijabarkan diatas, penelitian ini lebih mengarah kepada paradigma administrasi publik sebagai administrasi publik karena tempat yang

digunakan untuk penelitian sudah jelas berada di DLH Kota Semarang dan metode yang tepat untuk digunakan dalam penelitian menggunakan teori evaluasi kebijakan.

1.6.4 Kebijakan Publik

1.6.4.1 Pengertian Kebijakan Publik

Chandler dan Plano dalam Keban (2019:73) menjelaskan definisi mengenai kebijakan publik yaitu suatu kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menyelesaikan persoalan publik. Pengertian ini memiliki arti bahwa kebijakan publik akan selalu memanfaatkan sumber daya yang ada didalamnya untuk menangani permasalahan.

Charles O. Jones dalam Abdoelah, dkk (2016: 29-30) mendeskripsikan kebijakan publik yaitu suatu hubungan yang terjadi antara unit pemerintah dengan lingkungan. Pengertian ini mengartikan bahwa suatu unit dalam pemerintah memiliki keterkaitan dengan kondisi yang terjadi di lingkungan sekitar.

Chief J.O Udoji dalam Abdoelah, dkk (2016: 29-30) memaparkan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang digiring terhadap suatu permasalahan yang dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat. Pengertian ini mengartikan kebijakan publik sebagai suatu tindakan yang digunakan untuk memecahkan sebuah permasalahan yang berdampak kepada masyarakat.

Thomas R. Dye dalam Abdoelah, dkk (2016: 29-30) menyatakan kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan. Pengertian ini mengartikan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah pilihan yang diambil oleh pemerintah dengan berbagai pertimbangan untuk dilaksanakan ataupun tidak.

James Anderson (1979) dalam Maulana (2029: 1-2) menggambarkan kebijakan publik yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengatasi permasalahan yang sudah menjadi perhatian agar cepat terselesaikan. Pengertian ini memiliki arti bahwa kebijakan publik sebagai upaya yang dilakukan para aktor untuk penyelesaian masalah yang genting agar segera diatasi.

Carl I. Friederick dalam Maulana (2029: 1-2) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang digagas oleh individu, kelompok maupun pemerintah dengan hambatan dan peluang yang ada di lingkungan tertentu. Pengertian ini mengartikan bahwa kebijakan publik mendapatkan usulan tindakan dari berbagai aktor terhadap suatu lingkungan yang memiliki potensi dan permasalahan di dalamnya.

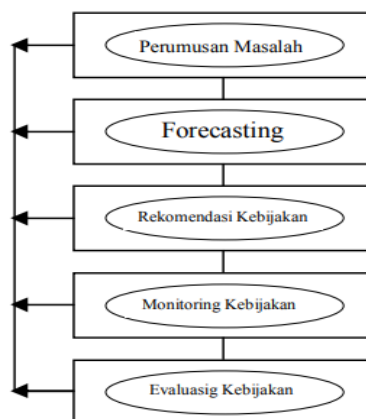
Harold Laswel dan Abraham Kaplan dalam Maulana (2029: 1-2) menyatakan kebijakan publik adalah suatu program yang memiliki orientasi kepada tujuan, mempunyai nilai dan praktik

tertentu. Pengertian ini mengartikan bahwa kebijakan publik sebagai program yang diluncurkan dengan memperhatikan tujuan, nilai dan praktik dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dijelaskan oleh beberapa ahli terkait dengan kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi kepada tujuan, memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, melihat potensi yang ada dilingkungan, dan mempertimbangkan hambatan yang dihadapi dalam mengatasi permasalahan publik.

1.6.4.2 Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn (Kadji, 2015:11) adalah suatu rangkaian dari kegiatan intelektual yang dilaksanakan pada proses kegiatan yang memiliki sifat politis. Berikut ini beberapa tahapan dalam proses kebijakan publik yaitu :



Gambar 1. 5 Proses Kebijakan Publik Menurut Dunn

Sumber : Kadji,2015

a. Perumusan masalah

Menyampaikan sebuah informasi tentang suatu keadaan yang menciptakan adanya permasalahan.

b. Forecasting

Menyampaikan sebuah gambaran konsekuensi yang dapat terjadi di masa yang akan datang dari suatu alternatif kebijakan yang ditetapkan maupun tidak ditetapkan.

c. Rekomendasi Kebijakan

Menyampaikan sebuah keuntungan dari alternatif-alternatif yang tersedia sehingga dapat menentukan alternatif yang memiliki keuntungan paling tinggi.

d. Monitoring Kebijakan

Menyampaikan gambaran konsekuensi yang didapatkan saat ini maupun sebelumnya atas ditemukannya suatu alternatif kebijakan yang didalamnya memuat tantangan maupun hambatan.

e. Evaluasi kebijakan

Menyampaikan sebuah penilaian atas kinerja dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Selain pendapat dari Dunn diatas, proses kebijakan publik juga disampaikan oleh Anderson dalam (Kadji, 2015:14-15) sebagai berikut :

a. Formulasi masalah

Menjelaskan mengenai hal-hal yang menyebabkan munculnya sebuah permasalahan

b. Formulasi Kebijakan

Menjelaskan mengenai pilihan kebijakan yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan dan pihak yang berkontribusi dalam formulasi kebijakan.

c. Penentuan Kebijakan

Menentukan salah satu pilihan kebijakan yang tepat ditetapkan untuk menyelesaikan masalah dan menjelaskan isi kebijakan secara jelas.

d. Implementasi

Berkaitan dengan aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan dampak yang didapatkan dari isi kebijakan.

e. Evaluasi

Mengetahui keberhasilan maupun kegagalan dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Howlet dan M. Ramesh dalam (Kadji, 2015:15-16) menyampaikan lima tahapan dalam proses kebijakan publik, diantaranya yaitu :

a. Penyusunan agenda

Sebuah langkah yang dilakukan supaya pemerintah memperhatikan suatu permasalahan yang terjadi.

b. Formulasi kebijakan

Suatu langkah dalam merumuskan beberapa pilihan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

c. Pembuatan kebijakan

Suatu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk bertindak maupun tidak bertindak.

d. Implementasi kebijakan

Suatu langkah dalam melaksanakan sebuah kebijakan supaya memperoleh hasil yang ingin dicapai.

e. Evaluasi kebijakan

Suatu langkah dalam menilai hasil yang didapatkan dari suatu kebijakan.

1.6.5 Evaluasi Kebijakan

1.6.5.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu dari proses kebijakan publik yang berada pada tahap yang paling akhir dalam sebuah kebijakan. William Dunn (Janatun, 2023) mengatakan evaluasi kebijakan merupakan suatu proses yang dilaksanakan untuk menilai hasil dari kinerja suatu kebijakan setelah kebijakan tersebut dibuat maupun dilaksanakan. Pengertian ini mengartikan

bahwa suatu kebijakan yang telah terlaksana akan dinilai atas kinerja kebijakan tersebut.

Lester dan Stewart (Mamahit, 2021) mengemukakan evaluasi kebijakan memiliki dua tugas yang berbeda yaitu menentukan suatu dampak yang didapatkan dari adanya kebijakan dan memberikan penilaian atas kebijakan sesuai dengan standar penilaian yang sudah diterapkan. Pengertian ini membedakan tugas dalam evaluasi kebijakan, dimana salah satu tugasnya lebih fokus kepada dampak yang dihasilkan, sedangkan tugas lainnya lebih mengarah kepada pemberian nilai dari kebijakan tersebut.

Anderson dalam Rantung (2024: 15-16) mendefinisikan evaluasi kebijakan merupakan kegiatan memberikan penilaian atas kebijakan yang dilaksanakan dengan memperhatikan substansi, pelaksanaan dan dampak yang ditimbulkan. Pengertian ini mengartikan bahwa evaluasi kebijakan adalah menilai suatu kebijakan dengan mempertimbangan berbagai hal mulai dari isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan dampak yang didapatkan dari kebijakan.

Mustopadijaja dalam Rantung (2024: 15-16) menggambarkan evaluasi kebijakan adalah suatu kegiatan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan dapat dikatakan berhasil ataupun gagal. Pengertian ini memiliki arti bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu cara untuk mengetahui adanya

kebijakan yang dijalankan dapat mencapai tujuan yang diharapkan atau justru mengalami kegagalan.

Muhajir (1996) dalam Rantung (2024: 15-16) menjelaskan evaluasi kebijakan merupakan proses menilai seberapa jauh suatu kebijakan dapat membawakan hasil sesuai dengan tujuan maupun target yang diinginkan. Pengertian ini memberikan arti dalam melaksanakan evaluasi kebijakan yaitu memberikan penilaian mengenai kesesuaian antara hasil yang diperoleh dengan tujuan maupun target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dijelaskan oleh beberapa ahli terkait dengan evaluasi kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan tahap terakhir dalam proses kebijakan publik dengan cara memberikan nilai atas kebijakan yang sudah dilaksanakan dengan memperhatikan kriteria yang digunakan untuk penilaian sehingga dapat mengetahui suatu kebijakan dikatakan berhasil maupun gagal dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Empat fungsi evaluasi kebijakan menurut Samodra Wibawa dalam Akbar dan Mohi (2018:19-20) sebagai berikut :

a. Eksplanasi

Melalui evaluasi kebijakan akan mengetahui realitas yang terjadi dalam menjalankan suatu program maupun kebijakan

sehingga membentuk pola hubungan dari berbagai realitas yang ditemukannya.

b. Kepatuhan

Melalui evaluasi kebijakan akan mengetahui perbuatan yang dilakukan para pelaksana kebijakan sudah sesuai dengan standar maupun aturan dalam suatu kebijakan atau justru tidak mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Audit

Melalui evaluasi kebijakan akan mengetahui hasil yang diperoleh dapat dirasakan oleh kelompok sasaran dengan tepat atau justru terjadi sebuah penyimpangan.

d. Akunting

Melalui evaluasi kebijakan akan mengetahui dampak yang diperoleh dari segi sosial maupun ekonomi dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan.

Selain fungsi dari evaluasi kebijakan diatas, Subarsono dalam Akbar dan Mohi (2018:20-21) mengemukakan beberapa tujuan dari evaluasi kebijakan diantaranya yaitu :

a. Menentukan tingkat kinerja kebijakan

Melalui adanya evaluasi dalam sebuah kebijakan akan mengetahui seberapa jauh suatu kebijakan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan.

b. Mengukur tingkat efisiensi kebijakan

Melalui adanya evaluasi dalam sebuah kebijakan akan mengetahui seberapa besar biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan kebijakan dan manfaat yang diperoleh dari kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Mengukur tingkat keluaran kebijakan

Melalui adanya evaluasi dalam sebuah kebijakan dapat mengukur seberapa besar kualitas dari keluaran yang didapatkan dari suatu kebijakan.

d. Mengukur dampak dari kebijakan

Melalui adanya evaluasi dalam sebuah kebijakan dapat mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kebijakan, dimana dampak yang diperoleh memiliki dua kemungkinan yaitu dampak positif maupun dampak negatif.

e. Mengetahui penyimpangan dalam kebijakan

Melalui adanya evaluasi dalam suatu kebijakan akan mengetahui penyimpangan yang terjadi dalam kebijakan dengan membandingkan antara tujuan dan sasaran dari suatu kebijakan dengan target yang telah diperoleh.

f. Menjadi masukan kebijakan mendatang

Melalui adanya evaluasi dalam suatu kebijakan akan memberikan masukan untuk memperbaiki kebijakan yang

ada sehingga di masa yang akan datang dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik dari sebelumnya.

1.6.5.2 Kriteria Evaluasi Kebijakan

Kriteria dalam evaluasi kebijakan menurut pendapat dari Wiliam Dunn dalam Akbar dan Mohi (2018:18) diantaranya yaitu :

a. Efektifitas

Efektifitas (*effectiveness*) menurut William Dunn merupakan suatu alternatif kebijakan yang dilaksanakan dapat memperoleh suatu hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Efektifitas dapat dilihat dari seberapa jauh suatu kebijakan sudah dilaksanakan, kesesuaian antara hasil yang diinginkan dengan kenyataan yang sebenarnya.

b. Efisiensi

Efisiensi (*efficiency*) menurut William Dunn merupakan sejumlah usaha yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu hasil sesuai dengan yang diharapkan. Efisiensi tidak akan lepas dari jumlah usaha yang dikeluarkan dan unit biaya yang dibutuhkan.

c. Kecukupan

Kecukupan (*adequacy*) menurut William Dunn merupakan suatu hasil yang ingin dicapai dari kebijakan mampu memecahkan sebuah permasalahan. Kecukupan lebih

mengacu kepada pemenuhan suatu kebutuhan dalam menghadapi permasalahan.

d. Pemerataan

Pemerataan (*equity*) menurut Wiliam Dunn merupakan suatu kebijakan mampu mendistribusikan sumber daya secara merata kepada kelompok yang berbeda-beda. Pemerataan akan menciptakan suatu keadilan sehingga tidak terjadi kekhawatiran yang dapat memicu protes dari masyarakat.

e. Responsivitas;

Responsivitas (*responsiveness*) menurut William Dunn merupakan hasil dari adanya kebijakan dapat memberikan kepuasan dalam kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok tertentu. Responsivitas berkaitan dengan reaksi yang muncul dari sasaran kebijakan dengan adanya kebijakan yang dilaksanakan.

f. Ketepatan

Ketepatan (*appropriateness*) menurut William Dunn merupakan hasil yang diharapkan dari adanya kebijakan dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat. Ketepatan dalam kebijakan dapat memberikan dampak perubahan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

1.6.6 Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan agar dapat mengatasi permasalahan sampah mulai dari awal mula terbentuknya sampah hingga berakhir pada pembuangan akhir (Lukman, 2022). Definisi ini diartikan sebagai usaha dalam memberantas sampah yang dimulai dari sumber-sumber yang dapat menghasilkan sampah hingga tempat pembuangan akhir.

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang berupaya mengatasi persoalan sampah yang dilaksanakan secara terstruktur, mencakup keseluruhan dan berkesinambungan dalam mengurangi maupun menangani sampah (Mamahit, 2021). Definisi ini diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang memiliki system yang saling berhubungan satu dengan lainnya sehingga dapat mengatasi permasalahan sampah secara menyeluruh.

Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menjelaskan bahwa dalam pengelolaan sampah memiliki dua bagian utama sebagai berikut :

a. Pengurangan Sampah

Pengurangan sampah adalah suatu aktivitas untuk mengurangi sampah mulai dari sumber-sumber yang dapat menghasilkan sampah, memanfaatkan kembali sampah-

sampah yang telah dihasilkan dan melakukan daur ulang sampah-sampah yang masih berguna.

b. Penanganan Sampah

Penanganan sampah merupakan runtutan aktivitas mulai dari memilah sampah, mengumpulkan sampah ke TPS, mengangkut sampah ke TPA, mengelola sampah dan melakukan pemrosesan akhir sampah.

Selain aspek-aspek yang dijelaskan diatas, Undang-Undang Pengelolaan Sampah juga menjelaskan sampah-sampah yang dikelola terbagi menjadi tiga golongan. Berikut ini tiga golongan sampah yaitu :

a. Sampah rumah tangga

Sampah rumah tangga berasal dari hasil dari kegiatan yang dilakukan sehari-hari dalam rumah tangga yang memiliki bentuk padat, tetapi tinja dan sampah spesifik tidak termasuk didalamnya.

b. Sampah sejenis sampah rumah tangga

Sampah ini dihasilkan dari kegiatan yang berasal dari berbagai kawasan (komersial, industri, khusus) dan berbagai fasilitas (sosial, umum).

c. Sampah spesifik

Sampah ini memiliki karakter yang khusus dibandingkan sampah lainnya karena dapat mengandung B3, limbah b3,

sampah yang dihasilkan dari suatu bencana, sampah yang berasal dari bongkaran bangunan dan sampah yang belum bisa terolah memakai teknologi.

1.7 Operasionalisasi Konsep

1. Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan pengelolaan sampah yang dilaksanakan di Kota Semarang dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, dimana kriteria dalam evaluasi kebijakan diantaranya yaitu :

1) Efektivitas

Efektivitas merupakan hasil yang diperoleh dari kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dalam pengelolaan sampah sesuai tujuan yang telah ditentukan.

- a. Pencapaian tujuan pengurangan sampah

2) Efisiensi

Efisiensi merupakan usaha yang dikeluarkan pemerintah dalam mengelola sampah untuk mendapatkan suatu hasil yang diinginkan.

- a. Penggunaan anggaran untuk pemeliharaan
- b. Teknologi dalam pengelolaan sampah

3) Kecukupan

Kecukupan merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam pengelolaan sampah mampu memenuhi hal-hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya.

- a. Penyediaan tempat penampungan sampah
- b. Penyediaan fasilitas pengelolaan sampah

4) Pemerataan

Pemerataan merupakan suatu bentuk keadilan yang diberikan oleh pemerintah secara merata dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah.

- a. Persebaran tempat penampungan sampah
- b. Persebaran informasi pengelolaan sampah

5) Responsivitas

Responsivitas merupakan suatu tanggapan yang diberikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan mengenai pengelolaan sampah.

- a. Tanggapan terhadap tumpukan sampah
- b. Tanggapan terhadap keluhan bau tidak sedap

6) Ketepatan

Ketepatan merupakan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah mampu membawa sebuah perubahan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

- a. Ketepatan sasaran

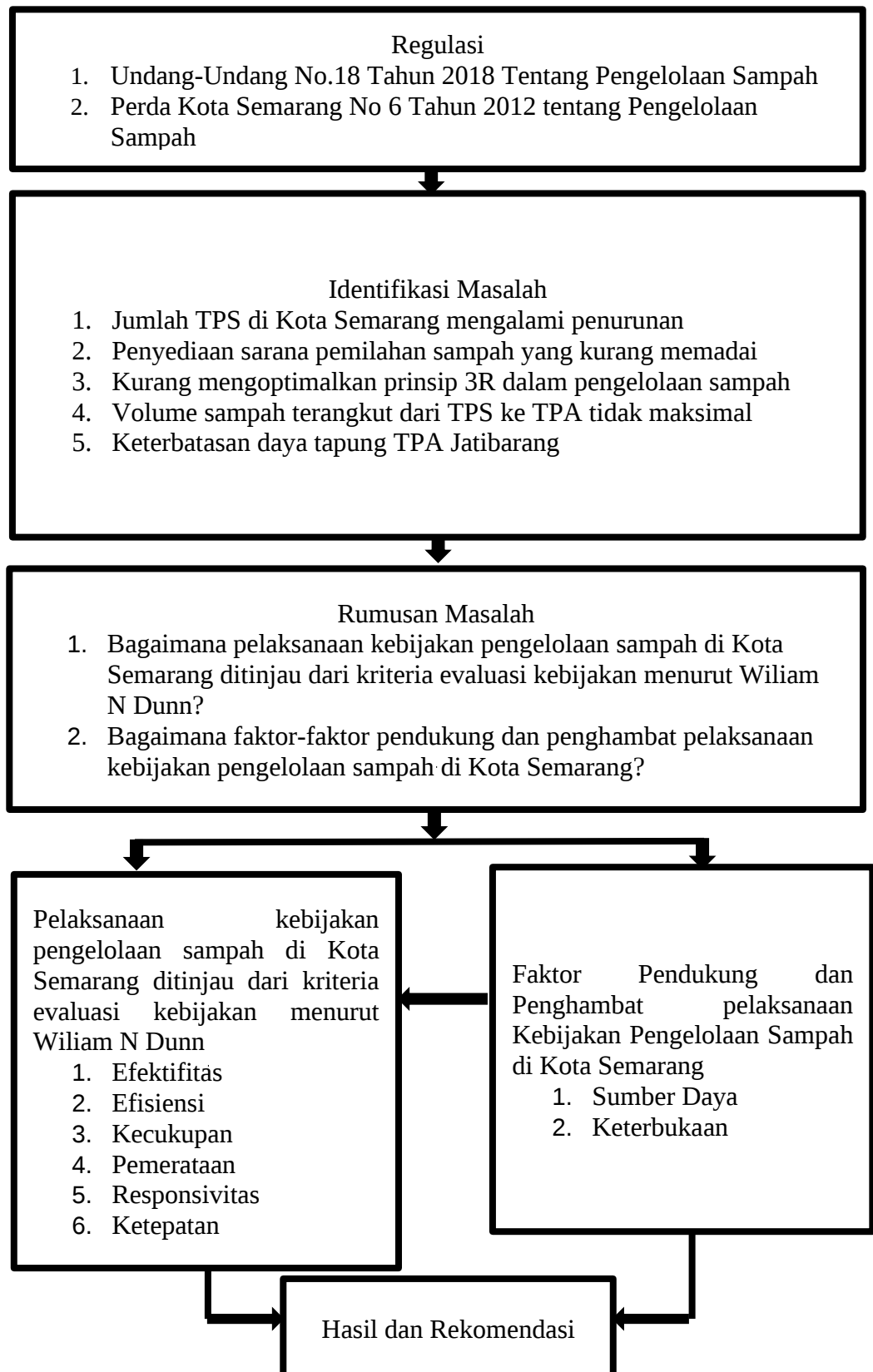
1.8 Fenomena Penelitian

Tabel 1. 6 Tabel Fenomena Penelitian

No	Fenomena	Subfenomena	Gejala
1.	Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang ditinjau dari kriteria evaluasi kebijakan menurut Wiliam N Dunn	Efektivitas	Efektivitas merupakan hasil yang diperoleh dari kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dalam pengelolaan sampah sesuai tujuan yang telah ditentukan. a. Pencapaian tujuan pengurangan sampah
		Efisiensi	Efisiensi merupakan usaha yang dilakukan pemerintah dalam mengelola sampah agar mendapatkan suatu hasil yang diinginkan. a. Penggunaan anggaran untuk pemeliharaan b. Teknologi dalam pengelolaan sampah
		Kecukupan	Kecukupan merupakan kebijakan yang diterakan oleh pemerintah dalam pengelolaan sampah mampu memenuhi hal-hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. a. Penyediaan tempat penampungan sampah b. Penyediaan fasilitas pengelolaan sampah
		Pemerataan	Pemerataan merupakan suatu bentuk keadilan yang diberikan oleh pemerintah secara merata dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah a. Persebaran tempat penampungan sampah b. Persebaran informasi

			pengelolaan sampah
		Responsivitas	Responsivitas merupakan suatu tanggapan yang diberikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan mengenai pengelolaan sampah. - Tanggapan terhadap tumpukan sampah - Tanggapan terhadap keluhan bau tidak sedap
		Ketepatan	Ketepatan merupakan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah yang mampu membawa sebuah perubahan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ketepatan sasaran
2.	Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang	Sumber daya	Sumber daya merupakan segala sesuatu yang dimiliki pemerintah untuk menjalankan kebijakan pengelolaan sampah. - Sumber Daya Manusia - Sumber Daya Finansial
		Keterbukaan	Keterbukaan merupakan kemampuan pemerintah dalam membagikan informasi tanpa ada hal yang disembunyikan. Kemudahan akses informasi

1.9 Kerangka Berpikir



1.10 Argumentasi Penulis

Permasalahan sampah yang terjadi Kota Semarang tidak kunjung selesai hingga saat ini. Pemerintah Kota Semarang telah mengeluarkan kebijakan mengenai pengelolaan sampah supaya masalah sampah dapat segera teratasi dengan tepat. Namun, kebijakan penanganan sampah Kota Semarang belum menyelesaikan permasalahan yang dirasakan Kota Semarang. Sampah yang dihasilkan Kota Semarang masih terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kota Semarang. Timbulan sampah yang yang dihasilkan Kota Semarang dapat tidak tertampung secara keseluruhan ke TPA Jatibarang apabila tidak diolah dengan tepat. Meskipun TPA Jatibarang menjadi tempat pembuangan akhir yang paling besar di Pulau Jawa tetapi daya tampungnya terbatas karena tidak adanya perluasan lahan. Peneliti tertarik untuk meneliti pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang ditinjau dari kriteria evaluasi kebijakan menurut William N Dunn meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengelolaan sampah yang berkembang sesuai fenomena yang terjadi dilapangan. Faktor-faktor yang ditemukan berasal dari sumber daya dan keterbukaan.

1.11 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah dalam suatu penelitian yang dilaksanakan secara sistematis supaya memberikan gambaran secara jelas mengenai proses penelitian. Metode penelitian bertujuan untuk memecahkan sebuah permasalahan yang sedang diteliti dengan memperoleh data yang akurat di lapangan.

1.11.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan suatu keadaan yang dirasakan oleh subjek penelitian dengan mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata maupun bahasa dan menggunakan metode ilmiah (Moloeng dalam Janatun, 2023:6). Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif karena menggambarkan secara jelas dalam bentuk kata-kata mengenai fakta yang terjadi dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang yang menggunakan teori evaluasi kebijakan.

1.11.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan fokus dan lokus yang digunakan dalam melaksanakan sebuah penelitian. Fokus yang diambil seorang peneliti dalam melaksanakan penelitian mengarah kepada pengelolaan sampah di Kota Semarang. Sedangkan, lokus yang digunakan untuk penelitian ini

pada dinas yang fokus menangani masalah sampah di Kota Semarang yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

1.11.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan seseorang yang memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini memiliki keterlibatan langsung dalam permasalahan serta memiliki pemahaman dalam permasalahan yang dijadikan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*, dimana informan yang digunakan diawal penelitian berjumlah sedikit lalu bertambah banyak (Sugiyono ,2007:85). Teknik ini dipilih karena informan awal dari pelaksana kebijakan belum memberikan informasi yang mencukupi sehingga membutuhkan informan tambahan untuk memperkuat hasil penelitian. Subjek yang digunakan dalam penelitian terkait dengan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang diantaranya :

- a. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
- b. Sub Sarana dan Prasarana pengelolaan sampah
- c. Sub Penata Layanan Operasional pengelolaan sampah
- d. Kepala TPA Jatibarang
- e. Kepala TPS3R
- f. Masyarakat

1.11.4 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian terbagi menjadi dua yaitu data kuantitatif dan data kualitatif.

a. Data Kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data yang diperoleh dalam penelitian berbentuk angka-angka. Data kuantitatif sangat cocok digunakan untuk mengukur maupun menilai sesuatu.

b. Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan data yang diperoleh dalam penelitian dalam bentuk kata-kata. Data kualitatif sangat cocok digunakan untuk menganalisis maupun mendeskripsikan sesuatu.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian mengenai evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang menggunakan data kualitatif karena fokus utamanya mendeskripsikan mengenai penilaian suatu kebijakan tentang pengelolaan sampah yang ditetapkan di Kota Semarang.

1.11.5 Sumber Data

Sumber data merupakan sesuatu baik benda maupun orang yang dijadikan objek dalam penelitian untuk memperoleh data sesuai dengan permasalahan dalam penelitian (Alaslan, 2021:137). Sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dalam penelitian melalui wawancara maupun observasi. Peneliti mendapatkan informasi dari seseorang yang menjadi narasumber dan aktivitas yang ditemukan ketika pengamatan berlangsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen seperti buku, jurnal penelitian terdahulu, dokumen pemerintah, website resmi pemerintah.

Penelitian mengenai evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang menggunakan data primer yang diperoleh dari Sekretaris DLH Kota Semarang, Sub Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah, Sub Penata Layanan Operasional Pengelolaan Sampah, Kepala TPA Jatibarang, Kepala TPS3R, Masyarakat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, Renstra DLH Kota Semarang, data yang diberikan dinas, website SIPSN, Website DLH Kota Semarang, Website BPS Kota Semarang. Data primer dan sekunder digunakan untuk mensinkronisasikan kebenaran dalam melakukan penelitian.

1.11.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan oleh seorang peneliti dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian (Sugiyono, 2007: 224). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh seorang penulis diantaranya sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan mengenai kondisi yang akan diteliti (Alaslan, 2021:74). Menurut Sanafiah Faisal dalam Sugiyono (2007:226) observasi terbagi dalam tiga jenis diantaranya yaitu :

- 1) Observasi partisipatif yaitu seorang peneliti melibatkan dirinya secara langsung dalam melaksanakan aktivitas dari subjek yang sedang diamati. Peneliti dapat mengamati lebih dekat dan merasakannya secara nyata mengenai suka duka dari aktivitas yang berlangsung sehingga data yang didapatkan akan lebih lengkap dan akurat. Dalam observasi partisipatif terdiri menjadi tiga yaitu
 - Observasi pasif, seorang peneliti hanya melakukan pengamatan saja dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh subjek penelitian.

- Observasi moderat, seorang peneliti mengikuti beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh subjek penelitian sehingga posisinya dapat menjadi orang dalam maupun orang luar.
 - Observasi aktif, seorang peneliti mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan oleh subjek penelitian tetapi tidak secara lengkap.
 - Observasi lengkap, seorang peneliti terlihat seperti tidak melakukan penelitian karena terlibat secara penuh semua kegiatan yang dilakukan subjek penelitian.
- 2) Observasi tersembunyi atau tersamar yaitu seorang peneliti akan memberi tahu sejak awal mengenai identitas dirinya sebagai peneliti kepada subjek penelitian, tetapi pada kondisi tertentu peneliti dapat menyembunyikan identitas dirinya sebagai peneliti untuk mendapatkan data rahasia.
 - 3) Observasi tak terstruktur merupakan suatu pengamatan yang dilakukan tanpa adanya suatu persiapan dengan baik karena fokus penelitiannya belum terlihat dengan jelas.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertukar informasi melalui tanya jawab antara dua pihak yaitu peneliti dengan informan (Esterberg dalam Sugiyono, 2007:231). Wawancara dilakukan secara lisan antara dua pihak dengan cara tatap muka maupun berbicara menggunakan teknologi (Alaslan,

2021:77). Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2007:223) menyatakan beberapa macam wawancara antara lain :

- 1) Wawancara terstruktur yaitu seorang peneliti sudah memiliki gambaran mengenai informasi yang akan didapatkan dari informan. Peneliti menyiapkan pertanyaan yang sama kepada semua informan sehingga dalam melaksanakan wawancara akan menanyakan pertanyaan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- 2) Wawancara semi struktur yaitu seorang peneliti melakukan wawancara yang lebih mendalam supaya memperoleh pendapat dari informan secara terbuka mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Peneliti dapat menambahkan pertanyaan secara spontan yang berbeda-beda kepada informan karena disesuaikan dengan jawaban yang didapatkan dalam melaksanakan wawancara.
- 3) Wawancara tidak terstruktur yaitu seorang peneliti tidak mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan di awal penelitian. Peneliti hanya memiliki garis besar mengenai permasalahan dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik memperoleh data dengan mengumpulkan berbagai catatan yang dipublikasikan, gambar yang didapatkan maupun karya yang dihasilkan seseorang terkait dengan

penelitian. Dokumentasi dapat melengkapi informasi yang didapatkan dari observasi dan wawancara sehingga menyajikan hasil penelitian yang lebih terpercaya (Sugiyoo, 2007:240).

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini menggunakan teknik observasi pasif, dimana seorang peneliti mengamati secara langsung mengenai kondisi yang terjadi di lapangan tanpa terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh subjek penelitian. Wawancara yang dilakukan peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, dimana peneliti mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan dan pelaksanaannya memberikan tambahan pertanyaan untuk menggali informasi lebih dalam kepada subjek penelitian. Selain itu, untuk mendukung memperoleh informasi dalam penelitian menggunakan dokumentasi seperti renstra, undang-undang, peraturan daerah, data dari dinas, foto-foto terkait pengelolaan sampah.

1.11.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen (dalam Alaslan, 2021:86) mengemukakan bahwa cara menyusun data yang telah didapatkan dengan sistematis supaya dapat dipahami dengan mudah. Analisis data (Sugiyono, 2007:244) dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam beberapa kategori, menjabarkan data pada unit-unit, melakukan sintesa, membentuk suatu pola, menemukan hal yang penting dan menyimpulkan yang akan diceritakan kepada orang lain. Menurut

Miles and Huberman (dalam Alaslan, 2021:92) terdapat tiga tahapan dalam melakukan analisis data diantaranya yaitu :

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses menganalisis data yang membutuhkan kecerdasan seseorang dalam merangkum hal-hal yang penting dalam penelitian dan menemukan tema maupun pola yang tepat. Dalam melakukan reduksi akan disesuaikan dengan tujuan penelitian, apabila menemukan sesuatu yang baru akan menjadi perhatian khusus pada penelitian.

b. Penyajian data

Pada tahap ini merupakan lanjutan dari melakukan reduksi data, penyajian data akan menampilkan sebuah uraian secara singkat, tabel maupun bagan. Data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif berupa teks yang bersifat naratif dalam memaparkan hasil penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam analisis data, dalam menarik kesimpulan masih dikatakan sementara karena dapat berubah sewaktu-waktu ketika mendapatkan data pendukung selama penelitian masih berlangsung. Apabila data yang diperoleh tetap konsisten hingga akhir penelitian, maka kesimpulan yang telah diperoleh dapat dipercaya.

Dalam melakukan sebuah analisis, penelitian mengenai evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang akan mengikuti tiga tahapan secara urut dalam melaksanakan analisis data yang diperoleh dalam objek penelitian mulai dari reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1.11.8 Kualitas Data

Keabsahan data dalam kegiatan penelitian terfokus pada uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, uji konfirmabilitas. Salah satu teknik untuk menguji kebenaran suatu data yakni melalui teknik triangulasi. Triangulasi menurut Moelong (dalam Alaslan, 2021:101) merupakan cara yang paling tepat untuk menghilangkan suatu perbedaan dari fakta yang ada di lapangan saat data dikumpulkan. Tiga macam teknik triangulasi yang digunakan Sugiyono (dalam Alaslan, 2021:101) dalam menentukan keabsahan data diantaranya sebagai berikut :

a. Triangulasi sumber

Teknik yang digunakan untuk mengecek data yang telah didapatkan dari banyak sumber yang menjadi informan. Contoh dalam memperoleh data dapat mencari informasi dari atasan, bawahan maupun rekan kerja.

b. Triangulasi teknik

Teknik yang digunakan untuk mengecek data yang telah didapatkan dari sumber yang sama dengan cara yang tidak sama. Contohnya data dari hasil wawancara disesuaikan kembali dengan

data pengamatan dilapangan dan dilanjutkan dengan dokumen pendukung lainnya.

c. Triangulasi waktu

Teknik yang digunakan untuk mengecek data yang didapatkan dalam waktu yang berbeda. Contoh data yang diperoleh pada pagi, siang dan malam hari akan mendapatkan hasil yang berbeda meskipun memiliki kesamaan teknik yang digunakan.

Dalam menentukan keabsahan suatu data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber sangat diperlukan karena tidak cukup memperoleh data dari satu sumber saja melainkan membutuhkan sumber lain untuk memperkuat data yang didapatkan dalam penelitian. Triangulasi teknik diperlukan untuk mengkolaborasikan hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi supaya mendapatkan hasil yang valid.